



PERAN ATASE PERTAHANAN DI ABUJA NIGERIA GUNA MENANGKAL PERGERAKAN KELOMPOK SEPARATIS PAPUA

*The Role of The Defense Attachment In Abuja Nigeria To Determine
The Movement of The Papu Separatist Group*

Bangun Manahan Laurensus

Program Studi Strategi Dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan
tanjungbm@gmail.com

Abstract – The role of the Indonesian Defense Attache in Abuja, Nigeria is currently still not optimal in counteracting the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). The purpose of this research is to analyze the role of Athan RI in Abuja, Nigeria. The method used is qualitative by collecting data from direct actors. Some issues need attention: first, the local government authorities' lack of attention/attention to the ULMWP movement, second, the limited personnel at the Indonesian Defense Attache Office in Abuja, Nigeria, and third, the presence of NGOs and ULMWP supporting sympathizers in accredited countries of the Defense Attache Office Republic of Indonesia in Abuja. A special government policy is needed to increase the role of Athan RI in Nigeria in dealing with the Papua Separatists.

Keywords: Defense Attache, disintegration, Optimization

Abstrak – Peran Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria yang saat ini masih belum optimal menangkali pergerakan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Athan RI di Abuja, Nigeria. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data dari pelaku langsung. Ada persoalan-persoalan perlu menjadi perhatian: pertama, kurangnya atensi/perhatian otoritas pemerintah setempat terhadap pergerakan ULMWP, kedua, terbatasnya personel di Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria, serta ketiga, adanya LSM dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja. Perlu kebijakan pemerintah secara khusus untuk meningkatkan peran Athan RI di Nigeria dalam menghadapi Separatis Papua.

Kata kunci: Atase pertahanan, disintegrasi, Optimalisasi

1. Pendahuluan

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dihadapkan pada tantangan dan ancaman disintegrasi bangsa, sejalan dengan masih mengemukanya perjuangan pemisahan diri yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat.



Dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua khususnya di Papua Barat, sampai dengan saat ini setiap tanggal 1 Desember kerap dilakukan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Eksekutif *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* Markus Haluk yang menjelaskan bahwa momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961 silam¹.

Perjuangan pemisahan diri Papua Barat yang dilakukan KKB Papua dilakukan dalam bentuk perlawanan bersenjata terhadap TNI dan Polri yang bertugas di Papua melalui Operasi Damai Cartens, dimana TNI sendiri kapasitasnya sebagai unsur bantuan perkuatan kepada Polri. Operasi tersebut digelar untuk mencegah dan mengantisipasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KKB dan KKP, TNI melalui Kodam XVIII/Kasuari *membbackup* kekuatan unsur Polda Papua Barat untuk melaksanakan Operasi Kewilayahan Damai Cartenz-2022 guna mempersempit gerakan pendukung KKB dan KKP serta melaksanakan penegakkan hukum terhadap KKB dalam rangka mendukung perwujudan Provinsi Papua yang aman dan kondusif².

Disamping operasi yang digelar di dalam negeri, TNI juga mengintensifkan kegiatan penangkalan opini di luar negeri dengan memberdayakan Kantor Atase Pertahanan (Athas) RI di negara-negara yang terindikasikan sebagai sasaran kelompok separatis politik (KSP) Papua dalam rangka menggalang dukungan dari negara-negara di berbagai kawasan, termasuk di Afrika seperti yang dilakukan oleh tokoh politik KSP Benny Wenda yang terus berusaha menggalang dukungan perjuangan politiknya terhadap otoritas setempat dengan menggelar berbagai seminar maupun kegiatan lainnya yang mendiskreditkan pemerintah RI. Adanya perjuangan politik dari KSP Papua di Afrika yang terus berusaha untuk mewacanakan kemerdekaan bagi Papua Barat, menuntut konsekuensi logis bagi pemerintah Indonesia melalui perwakilannya yang berada di Afrika

¹ CNN Indonesia, 2021. Artikel tentang sejarah pengakuan Papua, lihat (<https://www.cnnindonesia.com/nasional>), diakses pada 6 Agustus 2022.

² Mapolda Papua, 2022. Rencana Operasi Damai Cartenz, Jayapura.



untuk dapat menangkal pergerakan *United Liberation Movement for West Papua* di negara-negara akreditasi. Oleh karenanya, peran Kantor Atase Pertahanan (Athn) RI di Abuja, Nigeria sesuai kapasitas tugas dan tanggung jawabnya sangat diperlukan, bukan hanya dalam kerangka peningkatan kerjasama militer Indonesia dengan militer Nigeria dan negara-negara akreditasi lainnya, namun juga dalam usaha menangkal manuver politik dari para tokoh KSP Papua dan simpatisannya yang berada di Nigeria dan negara-negara akreditasi lainnya, agar pemerintah negara setempat tidak terhasut oleh tindakan propaganda politik tokoh KSP Papua dan tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan pemisahan diri dari NKRI.

Kantor Athn RI di Abuja, Nigeria sesuai kapasitas dan tugas pokoknya sebagai organ dari Bais TNI dalam menyikapi perjuangan politik yang dilakukan oleh KSP Papua di negara-negara akreditasi, selama ini telah berusaha untuk melakukan serangkaian kegiatan diplomasi dengan otoritas pemerintah negara-negara akreditasi, melaksanakan kontra opini terhadap pergerakan ULMWP serta melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, tokoh politik dan tokoh pemuda dalam rangka dalam rangka menangkal pergerakan ULMWP. Pada pelaksanaannya, peran Kantor Athn RI di Abuja, Nigeria saat ini masih dihadapkan pada persoalan-persoalan menyangkut : pertama, kurangnya atensi/perhatian otoritas pemerintah setempat terhadap pergerakan ULMWP, kedua, terbatasnya personel di Kantor Athn RI di Abuja, Nigeria, serta ketiga, adanya LSM dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Athn RI di Abuja.

Persoalan-persoalan tersebut menimbulkan implikasi pada masih belum maksimalnya Kantor Athn RI di Abuja, Nigeria dalam menangkal pergerakan ULMWP sehingga propaganda-propaganda politik yang dilakukan tokoh-tokoh KSP Papua khususnya Benny Wenda masih berlangsung secara masif dan berpotensi mencapai keberhasilan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah negara-negara akreditasi Athn RI di Abuja yang akan berdampak pada semakin tingginya tekanan kepada Pemerintah RI dari negara-negara yang berhasil dihasut oleh KSP Papua sehingga akan membahayakan keutuhan NKRI.



Peran Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria merupakan ujung tombak pemerintah RI melalui TNI dalam menangkal perjuangan politik KSP Papua di negara-negara akreditasi. Untuk itu, kedepan diharapkan peran Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria dapat lebih optimal dalam melaksanakan diplomasi dengan otoritas pemerintah negara-negara akreditasi, melakukan kontra opini terhadap pergerakan ULMWP serta menggalang LSM dan simpatisan ULMWP di negara-negara akreditasi. Dengan demikian, maka dapat menjawab permasalahan *“bagaimana peran Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria guna menangkal pergerakan United Liberation Movement For West Papua di Negara Akreditasi ?*

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara terperinci dalam latar belakang, untuk mengoptimalkan *peran Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria guna menangkal pergerakan United Liberation Movement For West Papua di Negara Akreditasi* ditemukan tiga kata kunci yaitu: peran diplomasi, kondisi sumber daya personel dan kegiatan kontra opini. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 1. Bagaimana peran diplomasi Atase Pertahanan RI Abuja, Nigeria? 2. Bagaimana sumber daya personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria? 3. Bagaimana Kegiatan Kontra Opini dalam menangkal propaganda ULMWP di negara akreditasi?

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai Tinjauan Pustaka, antara lain: Peran, Diplomasi Pertahanan, kampanye Militer, Pertahanan negara, Penangkalan, Perang Informasi dan sumber daya manusia. Terkait dengan Teori Peran, penelitian ini menjelaskan bahwa peran Atase pertahanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya menjadi penting sebagai perwakilan dari Militer / TNI dalam melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan negara akreditasi sehingga dapat memberikan dampak yang positif baik kedua negara. Sedangkan dihadapkan dengan diplomasi militer yang merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan, disini Atase pertahanan harus mampu menerapkan diplomasi pertahanan dalam menjalin diplomasi dan juga koordinasi



sesuai dengan tugas yang diberikan oleh negara khususnya dalam menghadapi opini public yang dibawa oleh ULMPW terkait Papua. Sedangkan untuk Sumber daya Manusia, dimana merupakan point penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kantor atase pertahanan maka pemenuhan personel sesuai dengan kebutuhan di lapangan memerlukan perhatian agar dapat terpenuhi sesuai job desk nya masing-masing.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian ingin melihat kedalaman permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana dalam penelitian kualitatif dapat menyajikan data secara deskriptif eksploratif. Dalam menguraikan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sederhana, dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna daripada hasil suatu aktivitas. Pemilihan metode dan pendekatan tersebut oleh peneliti disebabkan oleh karena pokok permasalahan yang diteliti merupakan suatu hal yang bersifat krusial sehingga perlu untuk segera dipecahkan dengan solusi yang positif.

Peneliti memiliki harapan bahwa dengan menggunakan metode kualitatif permasalahan dapat segera terpecahkan. Guna memperoleh kedalaman tentang pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya peneliti menggunakan *indepth interview* dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan para informan yang merupakan Duta besar KBRI di Nigeria, Atase Pertahanan RI di Abuja Nigeria dan pelaksana fungsi Politik KBRI Abuja, Nigeria yang berkecimpung secara langsung dalam kegiatan KBRI dan Atase Pertahanan di Abuja, Nigeria. Adapun manfaat dengan menggunakan metode ini adalah data yang diperoleh akan lebih kredibel dan jauh lebih mendalam serta lebih bermakna sehingga tujuan penelitian tentang Peran Atase Pertahanan dalam menangkal pergerakan ULMWP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berhasil guna secara optimal.

Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam proses pemeriksaan keabsahan data bahwa suatu data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara pelaporan oleh Peneliti dengan yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan parameter perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan serta triangulasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Peran Atase Pertahanan RI Abuja Nigeria

Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan peran yang diembannya khususnya dalam melaksanakan diplomasi militer dengan negara akreditasi dalam rangka menangkal pergerakan ULMFWP.

Dari hal tersebut apabila dikaitkan dengan **teori peran**, yang menyebutkan bahwa Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini Atase Pertahanan dan jajarannya memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dalam meningkatkan diplomasi militer untuk menjalin kerjasama dan juga sekaligus menangkal pergerakan ULMWP tersebut. Dimana Peran Atase Pertahanan dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Peran Atase Pertahanan RI di Abuja RI sebagai wakil Militer RI yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menjaga hubungan militer dengan negara akreditasi memiliki tugas khusus untuk menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan kelompok yang menginginkan agar Papua merdeka dengan memberikan propaganda di negara akreditasi terhadap kondisi Papua yang tidak



benar sehingga menyudutkan pemerintah Indonesia. Disini Peran Athan harus dapat menangkal upaya-upaya tersebut dengan cara menjalin komunikasi dan meningkatkan hubungan kerjasama dan kepercayaan dengan negara akreditasi sehingga sedikit demi sedikit dapat mengikis anggapan propaganda negatif tersebut dan merubah menjadi opini positif yang dilihat dari peran Atase pertahanan RI tersebut dalam menjalin komunikasi dengan otoritas negara akreditasi.

Dalam **teori Kampanye Militer** menyebutkan bahwa Kedudukan kampanye militer dalam strata perang berkaitan dengan kewenangan dan proses pengambilan keputusan militer untuk menghadapi ancaman. Strategi Raya/Strategi Nasional (*Grand/National Strategy*) merupakan ilmu dan seni untuk memberdayakan dan menggunakan seluruh kekuatan nasional dalam rangka memenangkan perang. Strategi Nasional berisi strategi diplomasi, strategi ekonomi, strategi militer dan strategi lainnya yang digunakan untuk mencapai sasaran berupa cita-cita nasional, tujuan nasional dan kepentingan nasional. Dalam hal ini peran Atase Pertahanan dalam menggunakan strategi diplomasi pertahanan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara, dengan menjalin kerjasama dan mampu mengajak negara akreditasi untuk mendukung RI terkait masalah Papua maka akan memberikan hubungan yang meningkat antar negara di Nigeria dan negara akreditasi lainnya.

Selanjutnya dihadapkan dengan **teori Diplomasi Pertahanan** yang menyebutkan bahwa Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah menjalin komunikasi dan meningkatkan kepercayaan sehingga negara akreditasi memiliki pandangan positif selain hubungan kerjasama yang sudah terjalin.

Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Atase Pertahanan RI memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pandangan positif / negatif dari negara akreditasi terhadap negara Republik Indonesia,



dengan menempatkan peran yang tepat, Atase Pertahanan RI dapat meningkatkan kerjasama antar negara, komunikasi dan kepercayaan sehingga dapat merubah opini masyarakat dari negara akreditasi terhadap negara Republik Indonesia.

Oleh karenanya solusi yang dapat diberikan agar peran atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria dapat Meningkatkan atensi/perhatian otoritas negara setempat terhadap pergerakan ULMWP **melalui** dukungan kebijakan politik luar negeri terhadap peran Atase Pertahanan dalam penyelenggaraan Diplomasi dengan otoritas pemerintahan negara Akreditasi dan sosialisasi program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah RI di Papua terhadap otoritas pemerintahan negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja **dengan metode** diplomasi, koordinasi, sosialisasi menggunakan sarana Kebijakan Politik Luar Negeri, Forum Pertemuan antar Kementerian, Tim Sosialisasi **dalam rangka mencapai tujuan** terwujudnya ketegasan dari otoritas pemerintah negara-negara akreditasi dalam menolak kehadiran kelompok ULMWP dan simpatisannya di negaranya masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan yakni Dengan meningkatkan atensi/perhatian otoritas negara setempat terhadap pergerakan ULMWP melalui dukungan kebijakan politik luar negeri terhadap peran Atase Pertahanan dalam penyelenggaraan Diplomasi terhadap otoritas pemerintahan negara Akreditasi, dan sosialisasi program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah RI di Papua terhadap otoritas pemerintahan Nigeria dengan metode diplomasi, koordinasi, sosialisasi menggunakan sarana Kebijakan Politik Luar Negeri, Forum Pertemuan antar Kementerian, Tim Sosialisasi dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya ketegasan dari otoritas pemerintah negara-negara akreditasi dalam menolak kehadiran kelompok ULMWP dan simpatisannya di negaranya masing-masing dengan cara :

- a. Dukungan kebijakan politik luar negeri terhadap peran Atase Pertahanan dalam penyelenggaraan Diplomasi terhadap otoritas pemerintahan negara Akreditasi.
- b. Sosialisasi program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah RI di Papua kepada otoritas pemerintahan negara-negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja.



3.2 Sumber daya Personel kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria

Dalam kaitan sumber daya personel maka teori yang terkait adalah Teori Sumber daya manusia, Teori Kampanye militer dan Teori Pertahanan negara. Dalam suatu strategi militer, kebutuhan personel merupakan faktor penting yang memiliki fungsi vital dalam suatu pelaksanaan strategi. Dimana dukungan personel baik itu kualitas maupun kuantitas akan mendukung terlaksananya kampanye militer / strategi militer yang berdampak pada pertahanan negara secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam **teori sumber daya manusia**, dijelaskan bahwa Secara global, manajemen Sumber Daya Manusia harus dilakukan dimana saja termasuk pada organisasi kecil sekalipun. manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien haruslah memenuhi kriteria kuantitas maupun kualitas yang diharapkan oleh tujuan bersama. Harapan yang ingin dicapai dalam manajemen tersebut adalah bahwa keseluruhan pengaturan yang ditujukan untuk kemajuan organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Empat fungsi utama dalam Manajemen yaitu Planning (perencanaan), Organizing (organisasi), Directing (pengarahan), dan Controlling atau pengendalian (POAC) menjadi suatu patokan dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga diperlukan suatu manajemen yang tepat dalam membina dan memfungsikan organisasi tersebut dengan baik. Dihadapkan dengan situasi dan kondisi Sumber daya personel yang ada di kantor Atase pertahanan RI di Abuja Nigeria yang terbatas maka secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada pelaksanaan tugas kantor Athan tersebut. Pemenuhan kebutuhan personel baik secara kualitas maupun kuantitas akan memberikan dampak positif kepada pelaksanaan tugas Athan secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi tugas pokok. Oleh karenanya pemenuhan dan penyiapan personel yang akan ditempatkan di kantor atase pertahanan RI di Abuja Nigeria harus menjadi perhatian dari Komando atas dan juga pemerintah RI dalam hal ini Kemenlu.

Dihadapkan dengan **Teori Kampanye Militer**, Kebutuhan akan tujuan-tujuan penyelenggaraan kegiatan pertahanan dan keamanan dalam perspektif baru tersebut memunculkan konsep pertahanan baru yaitu Sistem Pertahanan Semesta. Sistem Pertahanan



Semesta (Sishanta/ Total Defence) adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta di mana seluruh warga negara dan seluruh sumberdaya nasional lainnya terlibat secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman (semesta mendukung). Keruntuhan negara-negara terjadi manakala mereka tidak memiliki sistem pertahanan negara yang kuat.

Ancaman yang datang tidak mengenal waktu, bisa datang kapan saja dan dimana saja. Demi bertahannya sebuah negara dari berbagai bentuk ancaman untuk itu diperlukan penyiapan strategi pertahanan negara sejak dini sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan pemerintah harus menggelar perang semesta. Pelibatan seluruh sumber daya nasional diperlukan termasuk sumber daya manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa Sumber daya Manusia / personel memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas, dihadapkan dengan tulisan ini maka personel dalam mendukung tugas, fungsi dan tanggung jawab kantor Atase pertahanan memiliki peran yang cukup krusial sehingga pemenuhan personel harus menjadi perhatian guna menghadapi ancaman yang muncul.

Dihadapkan dengan Pertahanan negara, maka kemampuan suatu negara dalam membangun kekuatan pertahanannya harus selalu dikaitkan dengan kemampuan sumber daya nasional yang dimilikinya, agar menjadi suatu kekuatan yang efektif. Salah satu sumber daya nasional yang memainkan peran penting dalam pertahanan nasional adalah Sumber Daya Manusia. Potensi SDM Indonesia yang begitu melimpah tentunya menjadi keunggulan bila mampu dikoordinasikan menjadi sistem pertahanan. Permasalahan pertahanan negara yang semakin bervariasi dalam perkembangan spektrum ancaman, tentunya membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal untuk pelaksanaan ataupun pembuatan kebijakan pertahanan negara. Negara Indonesia tidak dapat lagi mengedepankan kekuatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Dalam hal ini Sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai faktor penting dalam



mendukung peran atase pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mana mendukung juga pertahanan negara secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu maka dalam memenuhi kebutuhan personel di Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria melalui kebijakan penambahan personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria, dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di negara akreditasi untuk menjadi staf Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria **dengan metode** reorganisasi, pengadaan, koordinasi, kerjasama **menggunakan sarana** Program kerja Kantor Atase Pertahanan bidang Personel, OAP di negara akreditasi, Panitia Seleksi dalam rangka mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria pada semua jabatan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan personel di Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria melalui kebijakan penambahan personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria, dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di negara akreditasi untuk menjadi staf Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria dengan metode reorganisasi, pengadaan, koordinasi, kerjasama menggunakan sarana Program kerja Kantor Atase Pertahanan bidang Personel, OAP di negara akreditasi dengan cara : a. Kebijakan penambahan personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria. b. Memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) di negara akreditasi untuk menjadi staf Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria.

3.3 Kegiatan Kontra Opini dalam menangkal ULMWP di negara Kreditasi.

Atase Pertahanan RI memiliki tugas pokok untuk menjaga citra negara di negara perwakilan, dihadapkan dengan adanya upaya dari ULMWP untuk mendiskreditkan NKRI dalam hal kedaulatan dan upaya untuk mencari dukungan dari negara lain di luar negeri maka perlu melakukan tindakan-tindakan yang konkret dalam menghadapi upaya dari ULMWP tersebut. Dihadapkan dengan teori Peran, Teori Diplomasi Pertahanan, Kampanye Militer, Pertahanan negara, penangkalan dan teori perang informasi dapat dijabarkan sebagai berikut : sesuai dengan **teori peran**, maka Peran Atase pertahanan sebagai wakil militer dari NKRI memiliki peran penting sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam



menghadapi upaya penggiringan opini terkait situasi di Papua untuk mendapatkan dukungan agar Papua merdeka dan menganggap bahwa RI melakukan tindakan buruk terhadap warga Papua yang menyebabkan citra RI di Nigeria dan negara akreditasi menjadi buruk.

Dalam teori Kampanye Militer, Atase Pertahanan RI di Abuja Nigeria memiliki hubungan penyelenggaraan politik luar negeri (diplomasi) merupakan upaya menggalang kekuatan internasional untuk mendapatkan dukungan politik dalam rangka penyelenggaraan kampanye militer. Sehingga peran Atase pertahanan menjadi sangat penting dalam menangkal upaya ULMWP tersebut dan meningkatkan citra NKRI di negara Nigeria dan Akreditasinya melalui strategi yang konkret.

Dikaitkan dengan Pertahanan negara, maka peran Atase pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dari rongrongan kelompok yang berupaya merusak citra NKRI dan menciptakan disintegrasi bangsa maka perlu adanya tindakan khusus yang terarah dan teratur dalam menghadapi upaya-upaya tersebut,

Dikaitkan dengan Teori penangkalan, maka Keberhasilan penangkalan dapat ditunjukkan apabila lawan mengurungkan niatnya. Disini dapat dilihat bahwa peran Atase pertahanan RI di Abuja Nigeria harus dapat melakukan strategi penangkalan dalam menghadapi upaya ULMWP tersebut dalam menggiring opini dan menciptakan kontra opini sehingga dapat merubah pandangan dari negara akreditasi

Sedangkan kaitan dengan teori perang informasi dimana Perang Informasi merupakan suatu tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk memanipulasi, meniadakan, mengacaukan atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, upaya dari atase pertahanan RI di Abuja Nigeria harus dapat melaksanakan upaya kontra opini tersebut.

Dari kegiatan Atase pertahanan RI di Abuja Nigeria dalam rangka kontra opini dalam menangkal propaganda UMLWP masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari teori peran yang pada hakekatnya memiliki tiga pengertian yaitu komitmen, koordinasi dan komunikasi. Dilihat dari komitmen Atase Pertahanan dalam melakukan kontra opini sudah



baik, namun belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam rangka meningkatkan kegiatan tersebut perlu melakukan kontra opini yang tidak hanya dilakukan oleh Athan saja, namun juga Kemenlu / KBRI Nigeria agar komitmen lebih maksimal. Koordinasi, yang dilakukan oleh Athan RI sudah dilaksanakan dengan baik, namun dalam menghadapi propaganda LSM yang mendukung ULMWP masih belum maksimal. Dalam rangka meningkatkan kontra Opini maka perlu dukungan dari siber TNI dalam menghadapi propaganda yang berlangsung di social media khususnya di negara-negara akreditasi. Demikian juga komunikasi yang dilakukan Atase pertahanan dalam menciptakan opini public yang positif sudah bagus namun dikarenakan dukungan personel dan juga perlengkapan yang sedikit maka pelaksanaan kontra opini tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal.

Dari keterkaitan teori tersebut diatas maka. Atase Pertahanan RI di Abuja Nigeria harus dapat Meningkatkan kontra propaganda dan penggalangan terhadap LSM/NGO dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja **melalui** kegiatan dan Operasi Intelijen Strategis, melakukan pendekatan kultural terhadap LSM dan simpatisan pendukung ULMWP dan menyelenggarakan Forum Diskusi Khusus dengan LSM dan simpatisan pendukung ULMWP dalam permasalahan separatisme di Papua **dengan metode** kerjasama, koordinasi, komunikasi **menggunakan sarana** program kerja bidang operasi, Forum Komunikasi LSM **dalam rangka mencapai tujuan** terwujudnya dukungan LSM dan simpatisan ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria terhadap kebijakan Pemerintah RI pada penyelesaian masalah Papua.

Upaya meningkatkan kontra propaganda/opini dan penggalangan terhadap LSM/NGO dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja melalui kegiatan dan operasi intelijen strategis, melakukan pendekatan kultural terhadap LSM dan simpatisan pendukung ULMWP serta menyelenggarakan Forum Diskusi Khusus dengan LSM/NGO dan simpatisan pendukung ULMWP membahas permasalahan separatisme di Papua dengan metode kerjasama, koordinasi, komunikasi menggunakan sarana program kerja bidang operasi, Forum Komunikasi LSM dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya dukungan LSM dan simpatisan ULMWP di negara akreditasi Kantor



Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria terhadap kebijakan Pemerintah RI dalam menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara : a. Melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen strategis. b. Melakukan pendekatan kultural terhadap LSM/NGO dan simpatisan pendukung ULMWP. c. Menyelenggarakan Forum Diskusi Khusus dengan LSM/NGO dan simpatisan pendukung ULMWP membahas permasalahan separatisme di Papua.

4. Kesimpulan dan Saran-saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran diplomasi Atase Pertahanan RI Abuja, Nigeria belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga timbul persoalan kurangnya atensi/perhatian otoritas pemerintah setempat terhadap pergerakan ULMWP. Kedepan, otoritas pemerintah setempat diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk menolak tokoh-tokoh kelompok ULMWP yang datang ke negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja dalam rangka menggalang dukungan serta menghentikan segala bentuk kegiatan baik berupa seminar maupun aksi propaganda yang mendiskreditkan pemerintah RI, termasuk ketegasan terhadap simpatisan dari ULMWP baik secara perorangan maupun LSM/NGO di negaranya masing-masing.
- b. Sumber daya personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria masih dihadapkan pada persoalan terbatasnya personel di Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria. Kedepan personel Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria yang dalam hal ini secara kuantitas dapat terpenuhi dan diawaki oleh personil-personel dengan kompetensi kemampuan yang mumpuni pada tanggung jawab dan tugas yang melekat dalam jabatannya masing-masing
- c. Kegiatan Kontra Opini dalam menangkal propaganda ULMWP di negara akreditasi belum memadai, sehingga masih terdapat persoalan adanya LSM dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, sehingga



kedepan harus ada upaya yang dilakukan agar LSM/NGO dan simpatisan di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja yang selama ini memberikan dukungan kepada ULMWP akan mengalihkan dukungannya terhadap segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah RI.

4.2 Saran-saran

Guna mendukung Peran Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria Guna Menangkal Pergerakan *United Liberation Movement For West Papua* di Negara Akreditasi Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI", maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. meningkatkan atensi/perhatian otoritas negara setempat terhadap pergerakan ULMWP melalui dukungan kebijakan politik luar negeri terhadap peran kantor Athan dalam penyelenggaraan Diplomasi terhadap otoritas pemerintahan negara Akreditasi dan sosialisasi program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah RI di Papua terhadap otoritas pemerintahan Nigeria dengan metode diplomasi, koordinasi, sosialisasi menggunakan sarana Kebijakan Politik Luar Negeri, Forum Pertemuan antar Kementerian, Tim Sosialisasi dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya ketegasan dari otoritas pemerintah negara-negara akreditasi dalam menolak kehadiran kelompok ULMWP dan simpatisannya di negaranya masing-masing.
- b. memenuhi kebutuhan personel di Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria melalui kebijakan penambahan personel Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) di negara akreditasi untuk menjadi staf Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria dengan metode reorganisasi, pengadaan, koordinasi, kerjasama menggunakan sarana Program kerja Athan bidang Personel, OAP di negara akreditasi, Panitia Seleksi dalam rangka mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan personel Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria pada semua jabatan.
- c. meningkatkan kontra propaganda dan penggalangan terhadap LSM dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Athan RI di Abuja melalui kegiatan dan operasi intelijen strategis, melakukan pendekatan kultural terhadap LSM dan simpatisan



pendukung ULMWP dan menyelenggarakan Forum Diskusi Khusus dengan LSM dan simpatisan pendukung ULMWP membahas permasalahan separatisme di Papua dengan metode kerjasama, koordinasi, komunikasi menggunakan sarana program kerja bidang operasi, Forum Komunikasi LSM dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya dukungan LSM dan simpatisan ULMWP di negara akreditasi Kantor Athan RI di Abuja, Nigeria terhadap kebijakan Pemerintah RI pada penyelesaian masalah Papua.

d. Mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penangkapan / ekstradisi tokoh ULMWP Benny Wenda ke Indonesia melalui pendekatan kenegaraan baik dari Interpol maupun Bilateral dengan Inggris, mengingat status kewarganegaraan Benny Wenda sudah dicabut.

Daftar Pustaka

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*,. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Frans Pekey (2018), Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cendrawasih.
- Halkis, Mhd, 2020, The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua, *Journal Society*, Vol 8 No 1 (2020), Published June 30, 2020, DOI:<https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Jurnal Transformasi Global Vol.4 No 1. Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia
- Lexy J Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan RI*. Jakarta.



- Kementerian Pertahanan. (2020). *Bahan Pembelajaran Proxy War*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2007. *Postur Pertahanan Negara*. Dephan RI. Jakarta
- Laporan Kontra Opini Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Agustus 2020.
- Menlu RI, 2022. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 46/B/RO/VI/2020/01 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 04/B/RO/VI/2020/01 tentang Negara Rangkapan Atase Pertahanan Pada Perwakilan RI
- Pedrasan, R. (2015), *Asean Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community*, Heidelberg: University Heidelberg.
- Mulloy, G. (2007). *Japan's Defense Diplomacy and Cold Peace in Asia*. *Asia Journal of Global Studies* Vol. I (1).
- Mabes TNI, *Prosedur dan Mekanisme Kerja Kantor Atase Pertahanan dan Mapolda Papua*, 2022. *Rencana Operasi Damai Cartenz*, Jayapura.
- Sekretariat Negara RI, *Naskah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*.
- Sekretariat Negara RI, (2002). *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI, (2004). *Undang-Undang RI No 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI, (2015). *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia*. *Penasihat Militer*.
- Simatupang, Goldy Evi Grace (2013), "Diplomasi Pertahanan ASEAN dalam Rangka Stabilitas Kawasan", *Quarterdeck*, Vol. 7 No. 1, *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM)*, Jakarta,.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media



- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*: Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan Kesebelas*. Bandung; Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penyusunan Tesis*. Bogor: Unhan RI Press.
- Uhar Suharsaputra. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama
- United Nations. "Peacekeepers Day". Retrieved from <https://unicwash.org/peacekeeper-day> diakses pada 15 April 2020 pkl 12.30 WIB.
- Yusnawati (2007). *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.